

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI  
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN (PIPPK) DI  
KELURAHAN MERDEKA KECAMATAN SUMUR BANDUNG KOTA BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT**

Rina Siti Haliyah

NPP.28.0571

*Asdaf Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat*

*Program Studi Pembangunan dan pemberdayaan*

Email: [rshaliyah@gmail.com](mailto:rshaliyah@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Regional Development and Empowerment Innovation Program (PIPPK) is an initiative program to implement regional development strategies whose planning, implementation and evaluation processes involve direct participation of the community. **The purpose** of this study is to determine the level of community participation in the implementation of programs, inhibitions and efforts made to overcome obstacles in the implementation of the program. In this study the authors used qualitative research **methods** with a descriptive approach. Data collection techniques through interviews, observations and documentation. Data analysis techniques are carried out with data reduction, data presentation and conclusion drawing. **The results** of this study showed that of the five indicators of community participation, namely mind participation, energy participation and property participation went well. While the participation of skills and skills and social participation has not gone well. The obstacles faced during the implementation of the program is the lack of public awareness of the importance of participation in the Regional Development and Empowerment Innovation (PIPPK) program, community participation is still passive, public awareness in efforts to maintain and utilization of low program results. Efforts are made, enterprising empowerment in workshops or skills training, active online socialization to the community to raise public awareness to participate in government programs.*

**Keywords:** *Community Participation, Regional Development and Empowerment Innovation Program (PIPPK)*

**ABSTRAK**

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) merupakan program inisiatif untuk melaksanakan strategi pembangunan daerah yang proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya melibatkan partisipasi langsung dari masyarakat. **Tujuan** dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, penghambat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program tersebut. Pada penelitian ini penulis menggunakan **metode** penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil** penelitian ini menunjukkan bahwa dari lima indikator partisipasi masyarakat, yaitu partisipasi pikiran, partisipasi tenaga dan partisipasi harta benda berjalan dengan baik. Sedangkan partisipasi kemahiran dan keterampilan serta partisipasi sosial belum berjalan dengan baik. Adapun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK), partisipasi masyarakat masih bersifat pasif, kesadaran masyarakat dalam upaya pemeliharaan serta pemanfaatan hasil program rendah. Upaya-upaya

yang dilakukan, giat pemberdayaan dalam acara workshop atau pelatihan keterampilan, giat sosialisasi online kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam program pemerintah.

**Kata Kunci :** Partisipasi Masyarakat, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK)

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Secara umum pembangunan adalah suatu proses untuk melakukan perubahan yang dikerjakan terencana dengan tujuan memperbaiki taraf hidup, kesejahteraan, dan kualitas manusia. Indonesia yang melaksanakan pembangunan demi tercapainya kemajuan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan Bangsa dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 Alinea ke – 4. Guna mencapai keberhasilan pembangunan, semua perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan program harus ada nya keterlibatan partisipasi masyarakat, karena yang mengetahui masalah dan kebutuhan pembangunan daerah adalah masyarakat itu sendiri, dan masyarakat yang akan memanfaatkan serta mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan pembangunan daerah di wilayah tersebut. Partisipasi masyarakat yang penting dalam pembangunan sejalan dengan sudut pandang Conyers ( 1992: 154-155) yang mengatakan bahwa adanya "tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan itu penting"

1.Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi , kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.

2.Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut.

3.Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Daerah yang semakin pesat pembangunannya karena melibatkan partisipasi masyarakat setiap tahunnya adalah Kota Bandung yaitu ibu Kota Provinsi di Jawa Barat . Sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan yang mengacu pada Visi dan Misi Kota Bandung yaitu Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis didalamnya terdapat konsep Unggul yang menjelaskan bahwa dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya. Terciptanya Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) yang merupakan inisiatif untuk melaksanakan strategi pembangunan daerah yang proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya melibatkan langsung masyarakat. Kelurahan Merdeka dengan jumlah penduduk 10.572 menjadi kelurahan ke dua dengan jumlah penduduk terbanyak .Jika dibandingkan dengan kelurahan lain yang letaknya sama sama dipusat Kota Bandung dari hasil rekapitulasi serapan anggaran PIPPK nya kelurahan merdeka hanya mencapai 84,20% sedangkan Kelurahan lain mencapai 95,50%. Jika dilihat dari jumlah penduduk yang lebih banyak seharusnya partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan program ini yang tinggal di Kelurahan Merdeka lebih tinggi dibanding dengan kelurahan lainnya .Ruang lingkup penelitian pada ruang lingkup pekerjaan di Kelurahan Merdeka Kota Bandung, dan menganalisis pelaksanaan program terkait partisipasi masyarakat selama tahun 2020. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, identifikasi ruang lingkup permasalahan adalah sebagai berikut :

1.Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PIPPK.

2.Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembangunan daerahnya.

3.Upaya yang dilakukan oleh tim pelaksana Program di Kelurahan Merdeka.

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat, pendukung dan penghambat serta mengetahui upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan

dan Pemberdayaan Kewilayahan ( PIPPK) di Kelurahan Merdeka Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.

## 1.2. Permasalahan

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan di Kelurahan Merdeka ini, ruang lingkup permasalahannya adalah sebagai berikut ; Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PIPPK yang disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam setiap kegiatan sehingga harus selalu dihimbau oleh kelurahan terlebih dahulu, Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembangunan daerahnya, serta Upaya yang dilakukan oleh tim pelaksana Program di Kelurahan Merdeka yang kurang direspon oleh masyarakat.

## 1.3. Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini banyak terinspirasi dari beberapa penelitian sebelumnya mengenai Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan yang dilaksanakan di Kota Bandung dimana partisipasi masyarakat adalah salah satu faktor keberhasilan dari program ini. Penelitian Siti Alia dan Joko Maulana berjudul *Analisis Program Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kota Bandung* (Alia & Maulana, 2019) menemukan bahwa upaya penggerakan masyarakat dapat terwujud apabila semua lintas program dan lintas sektor serta masyarakat memahami tanggung jawab, tugas dan fungsinya. Untuk itu diperlukan peningkatan pemahaman, pengetahuan dan kemampuan lintas sektor/lintas program serta masyarakat, kegiatan pembinaan kader PKK, LPM dan Karang Taruna menjadi wahana yang menjembatani antara kebutuhan program dan proses kemandirian masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat yang terpenting adalah bagaimana menjadikan masyarakat pada posisi pelaku pembangunan yang aktif dan bukan penerima pasif oleh karena itu salah satu penyebab kurangnya penyerapan anggaran kelurahan merdeka dibanding dengan kelurahan cihapit dan diperlukannya diseminasi (Akib, 2012) yang dilakukan dengan baik.

Penelitian Nova Suryani, Bagus Sugiharto dan Dita anggraeni tahun 2019 berjudul *Peran Kecamatan Bandung Wetan Dalam Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan (PIPPK)* mendapatkan kesimpulan bahwa Kecamatan mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program inovasi pembangunan kewilayahan. Setiap penyelenggaraan PIPPK pengawasan dilakukan oleh kecamatan sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan PIPPK di kelurahan masing-masing. Kecamatan Bandung Wetan yang merupakan wilayah yang berada di pusat Kota Bandung memiliki anggaran yang cukup tinggi untuk pelaksanaan program PIPPK. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masing terdapat beberapa hambatan. Akan tetapi sampai saat ini masih dinilai efektif dalam upaya pemerintah memberikan pemberdayaan masyarakat yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Bandung Wetan. Untuk itu diperlukan peningkatan pemahaman, pengetahuan dan kemampuan lintas sektor/lintas program serta masyarakat, kegiatan pembinaan kader PKK, LPM dan Karang Taruna menjadi wahana yang menjembatani antara kebutuhan program dan proses kemandirian masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat yang terpenting adalah bagaimana menjadikan masyarakat pada posisi pelaku pembangunan yang aktif dan bukan penerima pasif oleh karena itu salah satu penyebab kurangnya penyerapan anggaran kelurahan merdeka dibanding dengan kelurahan cihapit dan diperlukannya diseminasi yang dilakukan dengan baik. (Alia & Maulana, 2019).

Penelitian yang berjudul *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan* karya Muhyidin, Deden Sumpena dan Ali Azis pada tahun 2017 menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui program inovasi

pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan (PIPPK) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan Rancanumpang relatif berhasil, hal ini dilihat dari banyaknya program yang telah dilakukan dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Gugi Gustendi dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Di Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung memberikan hasil dan kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PIPPK sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan petunjuk teknis. Selain itu, faktor pendukungnya adalah adanya pemerataan pembangunan, dukungan anggaran sebesar 100 juta bagi RW, PKK, LPM, dan Karang Taruna, serta adanya penyiapan instrumen pedoman teknis. Sedangkan Faktor Penghambat antara lain yaitu adanya perbedaan pola pikir di antara diantara lembaga-lembaga kewilayahan di lingkungan Kelurahan Margasari, masih minimnya penyerapan anggaran, dan kurangnya koordinasi di antara lembaga-lembaga kewilayahan di lingkungan Kelurahan Margasari yang selanjutnya penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan PIPPK di Kelurahan Margasari sudah berjalan dengan cukup baik, tetapi belum menyentuh seluruh aspek pencapaian keberhasilan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III.

Penelitian terakhir yang menjadi inspirasi bagi penulis adalah karya dari Irsyad Haniif Isakh, Jessica Claudia Rossa, Kaysea Safadristi Narendragharini, Khairunnisa Sultan Putri yang berjudul Kolaborasi dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Babakan Ciparay tahun 2020 dengan kesimpulan bahwa kolaborasi yang dilakukan oleh seluruh stakeholder dan masyarakat dalam program PIPPK di Kelurahan Babakan Ciparay telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa aspek. Pertama, dilihat dari posisi stakeholders dalam program PIPPK di Kelurahan Babakan Ciparay yang telah mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing dan ditempatkan sesuai dengan kompetensinya. Kedua, melalui hubungan yang dapat terjalin melalui berbagai forum yang diselenggarakan, seperti rembung warga, rapat kerja, dan musrenbang. Ketiga, stakeholders dan masyarakat telah menunjukkan komitmennya dalam program PIPPK di Kelurahan Babakan Ciparay. Keempat, adanya pelibatan seluruh stakeholder dan masyarakat dalam seluruh tahapan program PIPPK, menunjukkan keberhasilan program, dan pemberian sanksi. Terakhir, kepemimpinan yang kolaboratif dapat ditunjukkan melalui gaya kepemimpinan Pull Rather Than Push. Selain itu, keberhasilan kolaborasi ini juga didukung oleh karakteristik masyarakat Kelurahan Babakan Ciparay yang masih bersifat guyub. Walaupun begitu, masih ada beberapa kekurangan yang harus ditingkatkan seperti menambah platform media sosial sebagai sarana komunikasi massa dan peningkatan inovasi dalam kegiatan PIPPK.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan, menggunakan indikator yang berbeda juga dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Hamijoyo dan Iskandar dalam Huraerah (2008:102) yang menyebutkan jenis partisipasi dilihat dari bentuknya antara lain ;Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam rapat atau pertemuan;Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam bentuk tenaga untuk berbagai kegiatan perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain;

Partisipasi harta benda, yang diberikan partisipan dalam bentuk sumbangan harta benda, seperti alat kerja atau perkakas;Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan partisipan berupa dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya;Partisipasi sosial, yang diberikan partisipan sebagai tanda keguyuban, misalnya turut arisan, koperasi, layad (dalam peristiwa kematian), kondangan (dalam peristiwa pernikahan), nyam-bungan, mulang sambung.

## **1.5. Tujuan**

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan ( PIPPK) di Kelurahan Merdeka Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Provinsi Jawa Barat; mengetahui pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan ( PIPPK) di Kelurahan Merdeka Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Provinsi Jawa Barat . mengetahui upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan ( PIPPK) di Kelurahan Merdeka Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penggunaan metode deskriptif dilakukan dengan cara pengumpulan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan di lapangan, dokumentasi, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan**

#### **1. Tahap Persiapan dan Perencanaan**

Persiapan kegiatan Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Merdeka dilakukan beberapa tahap pelaksanaan mulai rembug warga dari masing-masing RT dan diajukan ke RW hingga pada pelaksanaan rapat dengan pihak kelurahan. Tahap persiapan ini diawali dengan sosialisasi serta rapat Musrenbang Kelurahan guna membangun kesiapan masyarakat. Dalam tahap persiapan ini, setiap RW mulai mengajukan dan menentukan apa saja yang dibutuhkan di wilayahnya masing-masing. Atas rekomendasi dari ketua RT ataupun warga sekitar seperti pada bidang infrastruktur dibutuhkan pembangunan pos ronda, gang ,gapura perbaikan jalan ataupun perbaikan gorong-gorong. Dalam pelaksanaan program biasanya banyak yang terlibat, tidak hanya dari kelurahan ataupun masyarakat saja namun kerap melibatkan pihak swasta contohnya dalam pelaksanaan pembuatan gorong-gorong menggunakan jasa dari pihak swasta karena apabila langsung ditangani oleh masyarakat tidak ada yang bersedia.

#### **2. Mekanisme Anggaran Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK)**

Sumber dana Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung, dalam mekanismenya setiap RW,LPM, PKK dan Karang Taruna di kelurahan akan mendapatkan anggaran dana sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) namun tidak dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk bantuan dana untuk kegiatan. Dengan komposisi 60% untuk infrastruktur dan 40% untuk pemberdayaan masyarakat. tahun 2020 ada sedikit perubahan mengenai anggaran yang digunakan karena terjadinya covid-19, adanya pengefisiensian dana sebesar 50%. Pada lingkup RW, Karang Taruna, dan LPM dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) sedangkan pada lingkup PKK dalam penyelenggaraan Dapur Umum. Sisa 50% pada lingkup RW, Karang Taruna, LPM, dan PKK diarahkan untuk kegiatan reguler maupun tambahan kegiatan penanganan Covid-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan PIPPK.

### 3. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan tahap pengaplikasian kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan. Sebelum pelaksanaan program, perangkat kelurahan mengadakan rapat atau lebih sering disebut rembug warga dengan seluruh ketua RW dan para ketua LKK ( LPM, Karang Taruna dan PKK) untuk menetapkan apa saja kegiatan yang sekiranya dibutuhkan dan akan dilaksanakan di lingkungannya masing-masing. Dalam situasi Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dikeluarkan adanya kebijakan baru mengenai Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan ini yang dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan dimana dari anggaran Rp.100.000.000 hanya bisa dipakai sebesar 50% saja untuk program regular yang biasa dilakukan dan sisanya sebesar 50% digunakan untuk mendukung kegiatan penanganan covid-19.

Salah satu program yang dilaksanakan pada tahun 2020 di lingkup PKK adalah adanya Program SABANDUNG (Sangu Bancakan Urang Bandung) yaitu gerakan berbagi nasi bungkus untuk warga terdampak covid-19. Dimana para Kader PKK di Seluruh Kelurahan termasuk di Kelurahan Merdeka yang menyiapkan dan memberikan nasi bungkus kepada para warga yang kurang mampu.

#### 3.2. Partisipasi Masyarakat

- Partisipasi Buah Pikiran

Kontribusi partisipasi berupa bentuk pemikiran di wilayah Kelurahan Merdeka sudah cukup baik. Masyarakat diajak untuk terlibat dalam program kegiatan pemerintah dari tahap yang paling awal yaitu tahap perencanaan pada rembug warga. Kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam setiap kegiatan dengan mengutarakan ide-ide atau pikiran-pikiran mereka sangat membantu pemerintah khususnya pemerintah Kelurahan Merdeka.

Antusiasme masyarakat dalam menyalurkan aspirasi kepada pemerintah sangat membantu pemerintah agar mengerti dan memahami kebutuhan masyarakat yang dipimpinya. Hal tersebut juga sangat membantu dalam program ini.

- Partisipasi Tenaga

Peran Masyarakat dalam bentuk tenaga tidak begitu banyak dalam hal pembangunan ataupun perbaikan infrastruktur, namun dalam rangka menjaga ataupun merawat lingkungan, Masyarakat sangat giat dalam melaksanakan kerja bakti. Partisipasi yang diberikan masyarakat dalam bentuk sumbangsih tenaga hanya alakadarnya karena lingkungannya mayoritas pekerja. Masyarakat berkenan untuk menyumbang tenaga mereka apabila ada waktu luang saja. Walaupun belum keseluruhan masyarakat terlibat karena berbagai hal yang menjadi halangan, tetapi tidak menyurutkan antusiasme masyarakat lain yang ingin juga membantu.

- Partisipasi Kemahiran dan Keterampilan

Dalam menjalankan program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan masyarakat dapat menyumbangkan kemahirannya serta keterampilannya sebagai bentuk dari partisipasi masyarakat dalam upaya mendukung program tersebut. Keterampilan yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan merdeka berupa ibu-ibu rumah tangga dan ibu-ibu kader PKK yang membentuk kelompok-kelompok kecil untuk bersama-sama bertani membuat makanan dalam menjalankan program SABANDUNG contohnya. Adapun pemuda-pemudi Kelurahan Merdeka maupun Karang Taruna yang mahir dalam membuat desinfektan ataupun yang biasa menggunakan alat semprotnya untuk mensterilkan lingkungan kelurahan Merdeka.

- **Partisipasi Harta Benda**  
Masyarakat menyumbangkan sebagian hartanya untuk keberlangsungan program merupakan salah satu bentuk dari partisipasi. Walaupun tidak semua masyarakat di lingkungan Kelurahan Merdeka merupakan masyarakat tingkat ekonomi atas, mereka rela menyumbangkan sebagian harta mereka untuk keberlangsungan program di lingkungan mereka. Partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangsih harta dan benda juga menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang hendak turut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat tetapi berhalangan untuk mengikutinya.
- **Partisipasi Sosial**  
Terdapat kendala yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan inisiatif masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Dalam hal ini partisipasi masyarakat masih tergolong pasif karena membutuhkan pihak lain terlebih dahulu untuk menyadarkan masyarakat sehingga pemerintah harus menghimbau sebelumnya agar masyarakat turut berpartisipasi.

### **3.3. Hambatan dan Upaya**

Penghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PIPPK pada tahun 2020 diantaranya :

- a. Anggaran dana untuk program PIPPK pada tahun 2020 mengalami pengurangan sebesar 50% karena adanya andemic covid-19 dan dituangkan dalam Peraturan walikota Bandung No 15 tahun 2020 .
- b. Tidak semua masyarakat memiliki pemahaman dan kemampuan atau kemahiran yang dapat menunjang program. Masyarakat yang tinggal di lingkungan Kelurahan Merdeka memiliki latar belakang yang beragam. Tidak semua memahami pentingnya berpartisipasi sehingga pemerintah harus terus melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami pentingnya keberlangsungan program.  
Keterampilan yang terbatas juga menjadi kendala dari jalannya program karena masih banyak masyarakat yang tidak memiliki keterampilan ataupun keahlian dalam bidang tertentu. Hanya segelintir orang yang mempunyai keahlian yang dapat digunakan untuk kemajuan program.
- c. Partisipasi masyarakat yang masih tergolong pasif. Masyarakat di Kelurahan Merdeka belum dalam tahap masyarakat yang memiliki inisiatif tinggi untuk berpartisipasi. Mereka mempunyai kemampuan berpartisipasi namun belum pro aktif dalam setiap kegiatan sehingga pemerintah masih harus menyerukan agar masyarakat bersedia untuk turut berpartisipasi dalam setiap kegiatan.

#### **Upaya :**

Dengan ditemukannya berbagai hambatan dalam pelaksanaan PIPPK di Kelurahan Merdeka, pemerintah perlu menanggulangi hambatan hambatan tersebut,diantaranya dengan dilakukannya hal-hal berikut ini :

- a. Untuk mengatasi hambatan mengenai anggaran dana, aparat Kelurahan Merdeka harus lebih berinovasi dengan berkoordinasi dengan para ketua LKK maupun ketua RW untuk bias memaksimalkan dana yang diefisienkan menjadi 50% untuk kemudian digunakan dalam pelaksanaan program pada tahun 2020 dimana terjadi pandemic covid-19 agar tidak membebani masyarakat. Penganggaran dana khusus untuk program ini sangat diperlukan dilihat dari besarnya manfaat yang akan masyarakat rasakan. Siasat masyarakat dalam menghadapi kekurangan dana ini adalah dengan menggalang dana iuran dari kas RT dan RW walaupun hal tersebut belum dapat menutupi kekurangan yang ada apalagi program tersebut dijalankan sepanjang tahun sehingga perlu adanya dana khusus demi keberlangsungan program tersebut.
- b. untuk menambah keterampilan dan keahlian masyarakat Kelurahan Merdeka, pemerintah gencar melakukan giat pemberdayaan dengan cara sosialisasi kampung ke kampung atau

dengan mengundang masyarakat terutama kepada para ibu rumah tangga serta pemuda dalam acara workshop atau pelatihan-pelatihan sehingga mereka memiliki skill yang mumpuni . Adapun kegiatan penyuluhan yang dilakukan bermacam-macam tema nya sesuai dengan kesepakatan masyarakat setempat yang diajukan kepada pemerintah Kelurahan Merdeka untuk mendatangkan orang yang ahli dalam bidang tersebut.

- c. Untuk mengatasi hambatan yang disebabkan karena kurangnya keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan program, pemerintah kelurahan melalui ketua RW rutin melakukan sosialisasi dengan mengundang masyarakat ke kantor kelurahan untuk mendapatkan pelatihan serta rutin melakukan giat sosialisasi online secara berkala. Kegiatan ini dilakukan karena masyarakat tidak selalu bisa hadir dalam giat sosialisasi karena halangan pekerjaan dan satu hal lainnya sehingga pemerintah berinisiatif untuk mengubah metode sosialisasi dari masyarakat yang datang untuk melakukan giat sosialisasi menjadi pemerintah yang hadir untuk melakukan giat sosialisasi.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

PIPPK merupakan salah satu program unggulan dalam masa pemerintahan Walikota Ridwan Kamil dari sejak terpilih sampai menyelesaikan amanah sebagai Walikota beberapa waktu yang lalu, program PIPPK diharapkan dapat menggerakkan kembali keaktifan masyarakat dalam membangun wilayahnya masing sesuai dengan asas keterbukaan. Tiga bentuk inovasi utama pada kepemimpinan Ridwan Kamil yaitu Bandung Smart City, Program Inovasi Pembangunan, Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) dan Penataan Pedagang Kaki Lima. Melalui PIPPK yang senada pada tujuan Bandung Empowerment City, yaitu didalam PIPPK terdapat semangat kebersamaan, desentralisasi, dan mendorong kemampuan leadership aparatur. Sasaran dari PIPPK adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan Kelurahan di Kecamatan yang diorientasikan pada pembangunan masyarakat setempat dengan pendekatan inovasi, desentralisasi dan kolaborasi dengan kebutuhan serta kemampuan masyarakat Kelurahan yang didukung sistem pendampingan, pengawasan dan pengendalian yang efektif (Ramdani & Habibi, 2017a).

Kecamatan mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program inovasi pembangunan kewilayahan. Setiap penyelenggaraan PIPPK pengawasan dilakukan oleh kecamatan sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan PIPPK di kelurahan masing-masing. bentuk pemberdayaan dari program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan di kelurahan Rancanumpang yaitu: pertama, Pemberdayaan di bidang ekonomi, masyarakat mulai memproduksi tas Tali kur, selain sebagai kerajinan tangan tali kur juga dijadikan sebagai peluang usaha untuk menambah kebutuhan hidup. Café Gowes Ramfes, café berbentuk seperti bus mini, Selain untuk pengembangan ekonomi produktif Ramfes ini juga sebagai bagian dari pengembangan wisata olahraga Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kedua, Pemberdayaan di bidang lingkungan, dengan melakukan pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan, pembangunan pos penjaga, lampu penerangan jalan, portal jalan, gapura, pagar pembatas, perbaikan kirmir, perbaikan saluran air dan pembangunan penampungan sampah. Ada juga dengan pengadaan air bersih, penanaman pohon kembali (Reboisasi), pembuatan biopori. Ketiga, Pemberdayaan di bidang Sosial Budaya, diantaranya dalam kesehatan melalui pelatihan, penyuluhan, sosialisasi Dasa Wisma, pemberian imunisasi, penyuluhan tentang bahaya Narkotika dan kenakalan remaja, senam sehat. posisi stakeholders dalam program PIPPK di Kelurahan Babakan Ciparay yang telah mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing dan ditempatkan sesuai dengan kompetensinya. Kedua, melalui hubungan yang dapat terjalin melalui berbagai forum yang diselenggarakan, seperti rembug warga, rapat kerja, dan musrenbang. Ketiga, stakeholders dan masyarakat telah menunjukkan komitmennya dalam program PIPPK di Kelurahan Babakan Ciparay. Keempat, adanya pelibatan seluruh stakeholder dan masyarakat

dalam seluruh tahapan program PIPPK, menunjukkan keberhasilan program, dan pemberian sanksi. Terakhir, kepemimpinan yang kolaboratif dapat ditunjukkan melalui gaya kepemimpinan Pull Rather Than Push. Selain itu, keberhasilan kolaborasi ini juga didukung oleh karakteristik masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat berperan penting karena merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program PIPPK sehingga kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Adanya sinergi antara pelaksana kegiatan juga ikut mempengaruhi partisipasi masyarakat. (Rina, 2021)

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan di Kelurahan Merdeka, penulis menarik kesimpulan:

1) Dalam pelaksanaan PIPPK di Kelurahan Merdeka Partisipasi masyarakatnya berdasarkan lima indikator yang dikemukakan oleh Hamijoyo dan Iskandar dalam Huraerah yaitu partisipasi pikiran terdapat peningkatan dalam jumlah partisipan kegiatan musrenbang setiap tahunnya sehingga dapat dibilang baik.

Partisipasi tenaga dapat terbilang baik dilihat dari kegiatan kegotongroyongan yang terdapat didalam program PIPPK dan kegiatan rutin yang melibatkan masyarakat. Partisipasi harta benda sudah baik namun masih harus ditingkatkan kembali mengingat kondisi ekonomi masyarakat Kelurahan Merdeka yang beragam. Adapun untuk partisipasi berupa kemahiran dan keterampilan serta partisipasi sosial masih rendah karena kurangnya keahlian dan kemahiran masyarakat yang dapat digunakan untuk menunjang program tersebut, sedangkan kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi masih tergolong kurang sehingga perlu dihimbau terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena sifat masyarakat yang pasif dan inisiatif masyarakat yang kurang untuk mencari tahu tentang kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat.

2) Penghambat dalam pelaksanaan program PIPPK di Kelurahan Merdeka pada tahun anggaran 2020 antara lain adanya pengurangan 50% anggran untuk pelaksanaan kegiatan sehingga sedikit kegiatan pada bidang ifrastruktur dan lebih fokus kepada kegiatan penanganan bencana (pandemi covid-19),selain itu keterbatasan keterampilan yang dimiliki masyarakat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi yang masih kurang, partisipasi yang dilakukan masyarakat masih bersifat pasif, kesadaran masyarakat dalam upaya pemeliharaan serta pemanfaatan hasil program juga masih rendah.

#### **5. UCAPAN TERIMAKASIH**

Terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada: Bapak Prof. Dr. Muh. Ilham, M.Si selaku dosen pembimbing pertama dan Bapak Dr. Drs. H. Lalu Moh. Danial, MT selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan banyak masukan, saran dan bimbingannya untuk penyelesaian Laporan Akhir ini. Bapak Heru Sulistiyo, S.Sos, M.Si selaku dosen penguji pada siding ujian komprehensif Laporan Akhir. Kang Tri Priyanto Manunggal Ing Tiyas S.STP selaku Lurah Merdeka sekaligus pembimbing penulis di Lapangan yang banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian.

#### **6. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A.BUKU**

Adi, Isbandi Rukminto. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: Fisip UI Press.

Alfitri. 2011. *Community Development, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Creswell, John W. 2014. *Research Design (pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed)*. Yogyakarta: Pustaka belajar
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Indrawan, Rully dan Poppi Yaniawati. 2014. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Koentjaningrat, 2013. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardikanto, Totok. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nazir, Moh. 2017. *Metode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 2012. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Silalahi, Ulber. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Refika
- Simangunsong, Fernandes. 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Soetomo, 2012. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pusat Pelajar.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sundariningrum. 2001. *Partisipasi Masyarakat*. Yogyakarta: Pelajar.
- Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.

## **B. JURNAL**

- Alia,Siti . Maulana, Joko . 2019. Analisis Program Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kota Bandung. *POLITICON : Jurnal Ilmu Politik* Vol.1 No.2 ; Hal 193-204.Website <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/politicon> diakses pada 07 Januari 2021
- Anggraeni, Dita. Sugiharto, Bagus. Suryani, Nova. 2019. Peran Kecamatan Bandung Wetan Dalam Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan (Pippk) . *Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi* Volume 7– Nomor 2, Desember 2019 . Website : <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi> . Diakses pada 07 januari 2021
- Azis, Ali . Muhyidin . Sumpena, Deden . 2017. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Volume 2, Nomor 2, 2017, 59-79. <https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/tamkin> . Diakses pada 07 januari 2021
- Haniif,Irsyad . Claudia,Jessica . Safadristi,Kaysea . Sultan,Khairunnisa . Mei 2020. Kolaborasi dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Babakan Ciparay . *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah* Volume 2.No.2.Website:<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ministrate/article/viewFile/9386/4530>. Diakses pada 07 Januari 2021
- Gustendi, Gugi . Implementasi Kebijakan Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan (Pippk) Di Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung . Maret 2018. <http://repository.unpas.ac.id/33811/>

## **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023
- Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 Tentang Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan

Peraturan walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

**C. SUMBER LAINNYA**

[https://web.facebook.com/KelurahanMDK/?\\_rdc=1&\\_rdr](https://web.facebook.com/KelurahanMDK/?_rdc=1&_rdr) diakses pada tanggal 5 November 2020

Badan Pusat Statistika Kota Bandung diakses pada tanggal 28 September 2020

Kota Bandung Dalam Angka 2017 diakses pada tanggal 28 September 2020

Kecamatan Sumur Bandung Dalam Angka 2020 diakses pada tanggal 7 Januari 2021